

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andriani Nurdin, *“Masalah Seputar Actio Pauliana”*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *“Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian”*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2005.
- Farida Hasyim, *“Hukum Dagang”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fred B.G. Tumbuan, *“Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998” dalam Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Rudhy A. Lontoh, Ed, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.
- H.M.N. Purwosutjipto, *“Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”*, Jakarta: Djambatan, 1978
- Hadi Shubhan, *“Hukum Kepailitan”*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Hartini Rahayu, *“BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Penerbit Setara Press, Malang, 2017.
- Helmi Juni, *“Filsafat Hukum”*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Imran Nating, *“Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jono, *“Hukum Kepailitan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Syamsudin, *“Oprasionalisasi Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *“Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional”*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Rachmadi Usman, *“Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Gramedia Pustakan Utama, Jakarta, 2017.
- Satijipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siti Anisah, *“Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Subekti, *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutantio Retnowulan, *“Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan”*, Penerbit Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996.
- Urip Santoso, *“Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah”*, Jakarta, Kencana Prenada Meida Group, 2005.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **JURNAL**

Abd Jalil Hamzah, 2017, *“Pembuktian Debitur Terhadap Actio Pauliana Dalam Kepailitan”*, Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, Vol. 1, No.1, Desember 2017.

Alfatra Panatagama, *“Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun”* (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.

Ardy Billy Lumowa, “*Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga*”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3034/2579>.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana*”, Jurnal Yudisial Volume 12, (2019).

Gedalya Iryawan Kale, (2018), “*Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor dalam Undang – Undang nomor 37 Tahun 2004*”, Kertha Semaya Vol.3, No.1, Januari 2015.

Rai Mantili, “*Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 6 No.2, 2020.

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Khoirul Rizal Lutfi, “*Implikasi Akta Pernyataan Notaris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*”, Adil : Jurnal Hukum, Volume 10 No.1, (2019).

## WEBSITE / INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/811c10405c32ae8102eb0439c4f4dc5.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-iactio-pauliana-i-dilakukan-pada-aset-yang-dibebani-hak-tanggung-c12178>